

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM INFORMASI, DAN
KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL
(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Siak)**

Oleh :

Desti Widiarti

Pembimbing : Rita Anugerah dan Sem Paulus

Faculty of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

E-mail : Destiwidiarti8@gmail.com

*The Effect of Human Resources, Information Systems, and Organizational
Commitment to The Application of Accrual Based Government
Accounting Standard*

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze on (1) The effect of human resources working in the finance department in the SKPD to the adoption of accrual-based government accounting standards in Siak, (2) The effect of the information system that has been applied to the adoption of accrual-based government accounting standards in Siak (3) The effect of existing organizational commitment towards the implementation of accrual-based government accounting standards in Siak. This research was conducted in Siak using primary data, namely the data from questionnaires filled out by respondents. The objects used in this study is a working unit (SKPD) in Siak district government. The population in this study were employees of the financial section in Siak district government. Respondents were selected using purposive sampling, data analysis in this study using multiple linear regression model. While processing the data in this study using SPSS 21. The results showed that the variables of human resources effect the implementation of accrual based government accounting standards. While variable information systems and organizational commitment has no effect on the application of accrual-based government accounting standards.

Keywords : government accounting standards, accrual based, the application of accrual based government accounting standard, the human resources, the information system, and the commitment of organization.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia berusaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) dengan terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satu bentuk dari usaha tersebut adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah ini

bertujuan untuk dapat memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik itu di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dalam suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

Komite Standar Akuntansi Pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian telah diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penggantian PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan selambat-lambatnya dilaksanakan 5 tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan atau pada Tahun Anggaran 2008. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum memberikan dampak yang serius bagi pemerintah untuk menerapkan basis akrual secara penuh. Azman (2015) menyatakan bahwa secara yuridis, keluarnya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual mengubah haluan basis akuntansi Pemerintah Indonesia dari *dual basis* menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan Pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga

implementasi penuhnya di tahun 2015.

Penerapan SAP berbasis akrual bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Implementasi harus dilakukan secara hati-hati dengan perencanaan, persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan agar pemerintah mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel (Norfaliza, 2015). Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut.

Faktor pertama yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah Sumber daya manusia. Menurut Sukirno (2004:172), Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia disini maksudnya adalah sumber daya manusia di bidang akuntansi. Adanya perbedaan antara standar akuntansi pemerintah berbasis kas dan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual membuat peran sumber daya manusia menjadi vital. Dimana ketersediaan dan kompetensi dari sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan tentunya sangat dibutuhkan oleh pemerintah (Norfaliza, 2015). Namun Widyastuti, dkk (2015) menyatakan bahwa Pemerintah daerah belum sepenuhnya menguasai basis akrual, karena dalam menggunakan Sistem

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) masih perlu dilakukan pelatihan-pelatihan cara mengaplikasikannya. Hal tersebut mengindikasikan masih rendahnya SDM yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan basis akrual tersebut. Padahal Norfaliza (2015) secara parsial membuktikan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu secara serius dalam menyiapkan kualitas SDM yang bekerja pada bagian keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan MSDM yang profesional agar tercapainya perubahan dalam sistem pencatatan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Faktor selanjutnya adalah sistem informasi. Menurut Hall (2009:9), Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan di distribusikan ke para pengguna. Sistem informasi adalah sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual di pemerintah memberikan tantangan baru. Ketersediaan perangkat lunak khusus dalam penyusunan LKPD tentunya sangat dibutuhkan pemerintah. Namun, Kusuma (2013), menyatakan bahwa “sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada

perangkat lunak khusus”. Hal ini tentunya merupakan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengimplementasikan PP No. 71 Tahun 2010. Padahal Widyastuti, dkk (2015) menyimpulkan bahwa sistem informasi memiliki pengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dimana Widyastuti, dkk (2015) menyatakan bahwa sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah sudah menyiapkan software dan hardware yang mendukung penerapan SAP berbasis akrual yaitu berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting adalah komitmen organisasi, Menurut Robbins (2008:100-101), komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi disini adalah komitmen dari Pemerintah Daerah. Komitmen dari pemerintah daerah merupakan keinginan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan perubahan sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan (Norfaliza, 2015). Sebagaimana dinyatakan oleh Azman (2015), “Perlu komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh sumber daya yang ada untuk melaksanakan atau mengimplementasikan SAP basis akrual sehingga implementasi SAP basis akrual yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Hal tersebut tentunya menyatakan betapa pentingnya komitmen pemerintah dalam

menerapkan suatu peraturan, dalam mana peraturan ini berupa suatu Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Sebagaimana di daerah lain, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak juga sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Penerapan standar akuntansi tersebut harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai penyusunan laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra dan Dodik (2015) dan Azman (2015). Variabel penelitian ini meliputi sumber daya manusia, sistem informasi, komitmen organisasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang diadopsi dari penelitian tersebut.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak seragam. Melihat pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Siak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi serta Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Serta tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi,

dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Akuntansi Berbasis Akrual

Definisi konsep akuntansi berbasis akrual sebagaimana tercantum pada SSAP 2 dalam Bastian (2006:114) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi berbasis akrual adalah penerimaan dan biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan tidak sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan”.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa:

“Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD”.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PP 71 Tahun 2010, Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual.

Sumber Daya Manusia

Menurut Sukirno (2004:172), Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas harus mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sistem Informasi

Menurut Hall (2009:9), Sistem informasi adalah serangkaian

prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan di distribusikan ke para pengguna.

Sistem informasi adalah sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan. Untuk mampu menerapkan SAP dengan maksimal dan sesuai dengan yang seharusnya maka tentu diperlukan kesiapan sistem informasi yang handal karena sistem informasi itulah tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Untuk itu, sistem informasi harus betul-betul tersedia dan mampu dipergunakan oleh pemerintah dalam menyongsong SAP berbasis akrual.

Komitmen Organisasi

Menurut Robbins (2008:100-101), komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi, keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu, sementara komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Secara ringkas penelitian ini akan menganalisis variabel-variabel sumber daya manusia, sistem informasi, komitmen organisasi dan

penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Sumber Daya Manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. SDM yang berkualitas harus mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Azman (2015), menyatakan dalam penelitiannya bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan.

H₁: Sumber daya manusia berpengaruh terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Menurut Hall (2009:9), Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan di distribusikan ke para pengguna.

Sistem informasi adalah sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

Widyastuti, dkk (2015) menyimpulkan bahwa sistem informasi memiliki pengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dimana Widyastuti, dkk (2015) menyatakan bahwa sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah sudah menyiapkan software dan hardware yang mendukung penerapan SAP berbasis akrual yaitu berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Sistem Informasi yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Ketersediaan perangkat lunak khusus dalam penyusunan LKPD tentunya sangat dibutuhkan pemerintah.

H₂: Sistem informasi berpengaruh terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Menurut Robbins (2008:100-101), komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotan dalam organisasi tersebut.

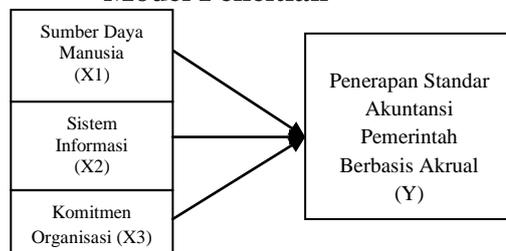
Dalam penelitiannya, Norfaliza (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi dalam suatu pemerintah berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual. Perlu komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh sumber daya yang ada untuk melaksanakan atau mengimplementasikan SAP basis akrual sehingga implementasi SAP basis akrual yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H₃: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

Model Penelitian

Gambar 1
Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan maret 2017.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Siak. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:85). Responden dipilih dengan kriteria pejabat eselon III dan IV pada SKPD pemerintah daerah Kabupaten Siak yang berjumlah 31 SKPD. Dari kriteria

eselon III dan IV pada setiap SKPD akan diambil 3 responden yaitu Kasubag Keuangan, dan 2 Staff Keuangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dan sistematis serta dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian diajukan kepada responden dan terakhir diserahkan kembali pada peneliti (kuesioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak sebagai responden dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam persamaan berikut ini:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan :

Y : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

A : Kostanta

b_{1,2,3} : Koefisien regresi dari variabel independen

x₁ : Sumber Daya Manusia

x₂ : Sistem Informasi

x₃ : Komitmen Organisasi

e : Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa

seluruh item pertanyaan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian dinyatakan valid.

Tabel 1
Uji Validitas Variabel

Variabel	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Sumber Daya Manusia	1	0,439	0,213	Valid
	2	0,623	0,213	Valid
	3	0,570	0,213	Valid
	4	0,463	0,213	Valid
	5	0,529	0,213	Valid
	6	0,555	0,213	Valid
	7	0,450	0,213	Valid
Sistem Informasi	1	0,614	0,213	Valid
	2	0,581	0,213	Valid
	3	0,641	0,213	Valid
	4	0,573	0,213	Valid
	5	0,511	0,213	Valid
	6	0,577	0,213	Valid
Komitmen Organisasi	1	0,550	0,213	Valid
	2	0,457	0,213	Valid
	3	0,548	0,213	Valid
	4	0,496	0,213	Valid
	5	0,554	0,213	Valid
	6	0,582	0,213	Valid
Penerapan SAP berbasis akrual	1	0,684	0,213	Valid
	2	0,716	0,213	Valid
	3	0,781	0,213	Valid
	4	0,771	0,213	Valid
	5	0,755	0,213	Valid
	6	0,790	0,213	Valid
	7	0,636	0,213	Valid
	8	0,684	0,213	Valid
	9	0,697	0,213	Valid
	10	0,723	0,213	Valid

Sumber : Data Olahan, 2017

Hasil Uji Reliabilitas Data

Uji reabilitas sebagai alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.

Tabel 2
Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Sumber Daya Manusia	0,793	Reliabel
Sistem Informasi	0,819	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,782	Reliabel
Penerapan SAP Berbasis Akrual	0,929	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2017

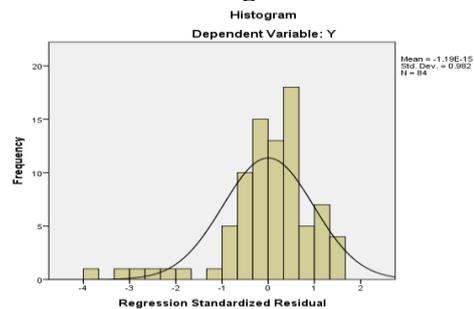
Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* > 0,70 untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa

variabel sumber daya manusia, sistem informasi, komitmen organisasi, dan penerapan SAP berbasis akrual adalah reliabel.

Uji Normalitas Data

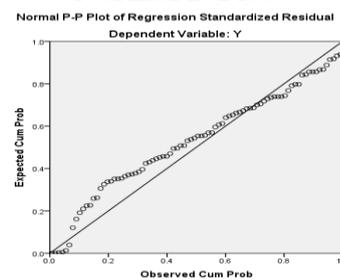
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas dengan Histogram



Sumber : Data Olahan, 2017

Gambar 3
Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-Plot



Sumber : Data Olahan, 2017

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa grafik histogram membentuk lonceng dan tidak menceng kekanan atau kekiri. Sehingga dengan analisis grafik histogram, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Dan menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan

mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dengan analisis *normal p-plot*, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Untuk hasil uji yang lebih meyakinkan maka dilakukan uji normalitas dengan analisis statistik menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil uji normalitas dengan analisis statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters a,b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.47750409
Most Extreme	Absolute	.144
Extreme	Positive	.069
Differences	Negative	-.144
Kolmogorov-Smirnov Z		1.321
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari tabel diatas diperoleh nilai signifikansi *Asymptomatic Significances* sebesar 0,061. Karena nilai signifikansi > 0,05 maka dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0.1. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
	(Constant)		
1	X1	.481	2.078
	X2	.424	2.358
	X3	.460	2.175

a. Dependent Variable: Y

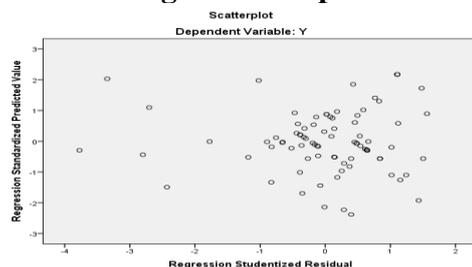
Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan VIF dan Tolerance menunjukkan bahwa nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinearitas atau bebas dari multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual, dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil pengujian heterokedastisitas dengan *scatterplot* adalah sebagai berikut:

Gambar 4
Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot



Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak (tidak membentuk pola tertentu) diatas dan

dibawah angka nol pada sumbu Y, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil analisis regresi linear berganda terlihat sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	4.797	5.331		.900	.371
X1	.876	.236	.482	3.706	.000
X2	-.144	.273	-.073	-.529	.599
X3	.467	.290	.215	1.613	.111

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,797 + 0,876X_1 - 0,144X_2 + 0,467X_3 + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.590 ^a	.348	.323	4.56068

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan, 2017

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,323 yang berarti 32,3% variabel dependen

penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dipengaruhi oleh variabel independen yang meliputi sumber daya manusia, sistem informasi, dan komitmen organisasi. Sedangkan sisanya (100% - 32,3%) = 67,7%) dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Hasil Uji Hipotesis Pertama

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis Pertama

Variabel	t hitung	t tabel	Sig	Keterangan
Sumber Daya Manusia	3,706	1,989	0,000	Berpengaruh

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari data yang diperoleh pada tabel diatas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,706 > 1,989$ dan $sig.t (0,000) < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Dalam penelitian ini, sumber daya manusia mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Ini berarti apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sehingga proses penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual bisa berjalan dengan lancar dan mulus serta juga akan dapat melaksanakan pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual dengan baik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Norfaliza (2015) yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Hasil Uji Hipotesis Kedua

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis Kedua

Variabel	t hitung	t tabel	Signifikan	Keterangan
Sistem Informasi	-0,529	1,989	0,599	Tidak Berpengaruh

Sumber : *Data Olahan, 2017*

Dari data yang diperoleh pada tabel diatas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,529 < 1,989$ dan $sig.t (0,599) > 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu sistem informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Dalam penelitian ini, sistem informasi tidak mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini dimungkinkan terjadi, sistem informasi akan mempunyai pengaruh pada saat penerapan SAP berbasis akrual berlangsung lebih lama. Dimana sistem yang digunakan adalah SIPKD yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penggunaan sistem informasi ini berbeda dengan sistem informasi yang digunakan sebelumnya, sehingga user dalam hal ini pegawai bagian keuangan sedikit kesulitan dalam penggunaannya sehari-hari.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Azman (2015),

Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Variabel	t hitung	t tabel	Signifikan	Keterangan
Komitmen Organisasi	1,613	1,989	0,111	Tidak Berpengaruh

Sumber : *Data Olahan, 2017*

Dari data yang diperoleh pada tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,613 < 1,989$ dan $sig.t (0,111) > 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu sistem informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Dalam penelitian ini, komitmen organisasi tidak mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini mengindikasikan bahwa SKPD Kabupaten Siak belum berkomitmen secara penuh dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini mungkin terjadi, komitmen organisasi belum mempunyai pengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual karena penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tersebut masih tergolong baru. Sehingga perlu penyesuaian bagi masing-masing SKPD untuk membentuk komitmen yang kuat dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Ardiansyah (2013).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial membuktikan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Siak.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua secara parsial membuktikan bahwa variabel sistem informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Siak.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Siak.
4. Hasil pengujian diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,323 yang berarti 32,3% variabel dependen penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dipengaruhi oleh variabel independen yang meliputi sumber daya manusia, sistem informasi, dan komitmen organisasi. Sedangkan sisanya $(100\% - 32,3\%) = 67,7\%$ dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model penelitian ini, seperti variabel motivasi, budaya organisasi, regulasi, komunikasi, dan lain-lain.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen masih kurang dari 50%. Hal ini menunjukkan masih terdapat banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Jika akan melakukan penelitian tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sebaiknya untuk mengembangkan instrument penelitian yang lebih baik atau jika dimungkinkan dapat menambahkan variabel lain seperti sarana pendukung, aturan hukum, dan organisasi tim yang disarankan dalam penelitian Ardiansyah (2013), serta variabel motivasi, budaya organisasi, regulasi serta komunikasi yang disarankan dalam penelitian Norfaliza (2015).

Saran

Penelitian ini hanya mengambil variabel sumber daya manusia, sistem informasi, dan komitmen organisasi. sehingga hanya membatasi pengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, seperti yang disarankan oleh Norfaliza (2015), antara lain yaitu: variabel motivasi, budaya organisasi, regulasi serta komunikasi, serta sarana pendukung, aturan hukum, dan

organisasi tim yang disarankan dalam penelitian Ardiansyah (2013).

DAFTAR PUSTAKAAN

- _____. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- _____. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- _____. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ardiansyah, 2013. *Factors Affecting The Affecting The Readiness of PP No. 71 Tahun 2010 About Government Accounting Standards (Case Study on Working Units in KPPN Malang's Working Area*. Jurnal.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hall, James A. 2009. *Accounting Information Systems*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- KSAP. 2010. Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrual Pemda, *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono., dkk. 2011. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group.